



**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Tri Resti Rezeki

022116009

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2022

ABSTRAK

Tri Resti Rezeki. 022116009. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. Pembimbing: Ketut Sunarta dan Sigit Edy Surono. 2022.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menjelaskan (1) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor (2) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor (3) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor.

Penelitian ini dilakukan pada lingkup Instansi Pemerintah Kota Bogor dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor yang terdiri dari 48 orang responden. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 24 dengan menggunakan uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini disebabkan SKPD Kota Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik. Akuntabilitas dari masing-masing SKPD masih rendah sehingga akan mempengaruhi kinerjanya. Pada anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan, sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan anggaran berbasis kinerja karena dengan anggaran berbasis kinerja yang optimal akan berdampak baik pada kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal : 1/03/2021 dan berakhir tanggal 28/12/2021

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Tri Resti Rezeki
NPM : 022116009
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Skripsi
Ketua Komisi : Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A. PIA.
Anggota Komisi : Sigit Edy Suroño, Drs., M.M.
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor

Menyetujui bahwa nama tersebut diatas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A. PIA.) _____

Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edy Suroño, Drs., M.M.) _____

Diketahui,

Ketua Program Studi(Dr. Arief Tri
Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CIA., CSEP., QIA., CFE.) _____



**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)



**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022

Tri Resti Rezeki
022116009

Disetujui

Ketua Penguji Sidang

(Monang Situmorang, Drs., M.M.,
Akt., CA)



Ketua Komisi Pembimbing

(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A. PIA.)



Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edy Surono, Drs., M.M.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Resti Rezeki

NPM : 022116009

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2022

Tri Resti Rezeki
022116009

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan sepuh hati, karena atas berkat dan rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semuanya itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti agar menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti, perkenankan peneliti untuk menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
3. Ibu Dr. Retno Indah Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.PIA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
5. Bapak Sigit Edy Surono, Drs., M.M. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku, serta kakak dan adik-adikku yang telah memberikan dukungan dan doanya yang tak terhingga serta bantuan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini.

8. Mas Nursyah sebagai orang yang selalu mendukung, mendoakan, selalu memberikan semangat dan motivasi, dan selalu menjadi teman berbagi suka maupun duka.
9. Sahabat-sahabatku tersayang Resti Saputri, Nurhani Salamah, Puji Herawati, dan Lolitasari yang selalu membantu, memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh peneliti, namun tidak mengurangi rasa terimakasih peneliti.

Semoga semua doa, bantuan, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Bogor, Januari 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN HAK CIPTA.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Maksud dan tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2. Kegunaan Akademis.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.1. Desinisi Akuntansi.....	8
2.1.2. Definisi Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.2. Anggaran Berbasis Kinerja	13
2.2.1. Definisi Anggaran	13

2.2.2.	Desinisi Anggaran Berbasis Kinerja	13
2.2.3.	Definisi Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2.2.4.	Pengukuran Kinerja.....	16
2.3.	Akuntabilitas Kinerja	19
2.3.1.	Definisi Akuntabilitas Kinerja.....	19
2.3.2.	Macam-macam Akuntabilitas.....	19
2.3.3.	Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja.....	20
2.3.4.	Sistem Akuntabilitas Kinerja.....	20
2.4.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	22
2.4.1.	penelitian Sebelumnya.....	22
2.4.2.	Kerangka Pemikiran	30
2.5.	Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....		32
3.1.	Jenis Penelitian	32
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	32
3.2.1.	Objek Penelitian	32
3.2.2.	Unit Analisis Penelitian.....	32
3.2.3.	Lokasi Penelitian	33
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.4.	Operasionalisasi Variabel.....	33
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	34
3.6.	Metode Pengumpulan Data	35
3.7.	Metode Pengolahan/ Analisis Data	35
3.7.1.	Uji Kualitas Data	36
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik	36
3.7.3.	Analisis Regresi	37

3.7.4.	Uji Hipotesis.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN		39
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1.	Sejarah Kota Bogor	39
4.1.2.	Gambaran Kota Bogor.....	40
4.1.3.	Visi dan Misi Kota Bogor.....	42
4.2.	Hasil Pengumpulan Data.....	43
4.2.1.	Deskripsi Karakteristik Responden	44
4.2.2.	Deskripsi Data Variabel	47
4.3.	Analisis Data	51
4.3.1.	Hasil Uji Kualitas Data.....	51
4.3.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.3.3.	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	55
4.3.4.	Pengujian Hipotesis	56
4.4.	Pembahasan.....	57
4.4.1.	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor	58
4.4.2.	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor	58
4.4.2.	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Secara Bersama-sama terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor.....	59
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....		60
5.1.	Simpulan	60
5.2.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		65

LAMPIRAN.....	66
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	2
Tabel 1.2 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2019.....	4
Tabel 1.3 Skala Pengukuran Kinerja.....	5
Tabel 2.1 Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kerja	21
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel 2.3 Matriks Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian	32
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 3.3 Daftar Tempat penelitian	35
Tabel 4.1 Nama Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor	41
Tabel 4.2 Rincian Tingkat Pengembangan Kuesioner.....	43
Tabel 4.3 Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner.....	44
Tabel 4.4 Deskripsi Jenis Kelamin Responden.....	44
Tabel 4.5 Deskripsi Jabatan Responden.....	45
Tabel 4.6 Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4.7 Deskripsi Lama Bekerja Responden.....	46
Tabel 4.8 Deskripsi Latar Belakang Pendidikan Responden	46
Tabel 4.9 Penerapan Akuntansi Sektor Publi (X1)	47
Tabel 4.10 Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	48
Tabel 4.11 Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Validatas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik	51
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Anggaran Berbasis Kinerja	51

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Instansi Pemerintah	52
Tabel 4.15 Hasil Uji Realibilitas	53
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Test	53
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	55
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	55
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Parsial (uji t)	56
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Parsial (uji F)	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4. 1 Diagram Scatterplot.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa orde lama pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tidak dikelola secara profesional yang menyebabkan terlalu banyak campur tangan pemerintah sehingga banyak perusahaan hanya dimanfaatkan oleh para birokrat (Firdaus, 2016). Adanya Sektor Publik berguna untuk memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya (Haryanto, 2017). Dari istilah Sektor Publik, salah satu yang dipahami yaitu tentang entitas atau organisasi. Menurut Majid (2019) entitas atau organisasi dengan motif dan tujuan mencari laba dikenal sebagai Akuntansi Sektor Bisnis. Sedangkan, entitas atau organisasi dengan motif dan tujuan selain mencari laba dikenal sebagai Akuntansi Sektor Publik.

Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan, (Biduri, 2018). Akuntansi Sektor Publik memiliki peranan yaitu memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggung-jawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya, serta melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik atau disebut Akuntabilitas (*Accountability*) dan juga dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu entitas atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam entitas atau organisasi, (Pamungkas, 2012)

Entitas atau organisasi pemerintah sebagaimana entitas atau organisasi publik pada umumnya, akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Sartika (2019) anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja, yang demikian anggaran juga merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin hendak dicapai nantinya. Anggaran berbasis kinerja sudah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Peraturan tersebut berubah kembali menjadi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisikan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Penggunaan anggaran di lingkup instansi pemerintah Kota Bogor belum sepenuhnya menerapkan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan penerapan *Performanced Based Organization*. Padahal, apabila penggunaan anggaran sudah disusun sesuai dengan proses penganggaran yang berbasis kinerja pemerintah dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik. Menurut Bastian (2010) anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja juga akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga perlu upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa mendatang.

Kinerja sendiri menjadi tolak ukur dalam menciptakan anggaran yang diperlukan. Berikut anggaran dan realisasi yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah Kota Bogor.

Tabel 1. 1
Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realiasi	
			Target (%)	Persentase (%)
Pendapatan Daerah	Rp2.639.970.560.688,00	Rp2.559.857.207.793,86	100	96,97
Belanja Daerah	Rp2.876.375.978.791,52	Rp2.528.507.371.799,19	100	87,91
Total	Rp5.516.346.539.479,52	Rp 5.088.364.579.593,05	200	184,88

(Sumber: kotabogor.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada tahun 2019 masih belum mencapai sesuai dengan target dan selisih antara jumlah anggaran dengan realiasi yang mengalami kelebihan, ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program

atau kegiatan yang belum tercapai dilaksanakan sepenuhnya. Dari total anggaran Rp 5.516.346.539.479,52 hanya Rp 5.088.364.579.593,05 anggaran yang berhasil dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor, dan masih ada sisa sekitar Rp 427.981.959.886,47. Menurut Herlina (2019) anggaran yang tersisa, akan menjadi masalah karena bisa menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, dimana realisasi kinerja program kegiatan yang belum tercapai dilaksanakan sepenuhnya atau bisa diartikan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran belum sepenuhnya optimal untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Wardani dan Silvia (2021) kegiatan yang melibatkan anggaran seringkali menjadi boomerang bagi akuntabilitas kinerja karena apabila mendapati pengelolaan keuangan yang buruk ditambah sasaran anggarannya yang tidak tepat, dapat mengakibatkan efek buruk, mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, dari itu Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting dilingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah (Prastianingrum, 2018).

Akuntabilitas atau (*Accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban”. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal (1) ayat (14) Akuntabilitas Kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik. Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas, Instansi Pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja di Instansi Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2019 berhasil mendapatkan bobot nilai sebesar 72% dan memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Namun, meskipun dengan predikat sangat baik hal itu tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga perlu adanya evaluasi, agar ditahun yang akan datang akuntabilitas kinerja dapat mencapai target yang diharapkan. Kota Bogor sendiri mengalami kendala yang harus diatasi yaitu kurangnya kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja. Sehingga, menyebabkan 21 sasaran dari 49 indikator sasaran yang diukur pada tahun 2019, diantaranya ditemukan 6 sasaran yang tidak mencapai target. Berikut data yang diperoleh, tingkat pencapaian kinerja sasaran Instansi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019.

Tabel 1. 2
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Instansi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan (smart People)	100,83
2.	Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat	108,70
3.	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	108,19
4.	Meningkatnya Kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	129,57
5.	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat	94,89
6.	Berkurangnya tingkat pengangguran	216,89
7.	Menurunnya tingkat kemiskinan	92,66
8.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	144,77
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	99,38
10.	Terkendalinya Tata Ruang Kota Bogor	101,11
11.	Berkurangnya tingkat kemacetan	88,02
12.	Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau	103,29
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	124,66
14.	Terkendalinya kualitas lingkungan	98,07
15.	Berkembangnya Sektor kepariwisataan	143,87
16.	Berkembangannya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif	103,66
17.	Terciptanya birokrasi Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	106,41
18.	Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima	92
19.	Meningkatnya nilai -nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	284,48
20.	Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat	100
21.	Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan harmonisasi antar umat beragama, antar suku, ras, dan golongan	100

(Sumber : kotabogor.go.id)

Tabel 1. 3
Skala pengukuran kinerja
Laporan kinerja instansi pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Data Capaian Kinerja Sasaran Instansi Pemerintah Kota Bogor, sarannya menunjukkan presentasi capaian yang beragam, ada yang sarannya cukup tinggi, sesuai, dan ada yang tidak tercapai. Kendala yang ada seperti kurangnya SDM pada Instansi Kota Bogor juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang ada dalam sasaran tersebut dan bisa menyebabkan akuntabilitas kinerja yang lemah. Padahal, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dapat dikatakan sangat tergantung dengan kinerja para anggotanya. Kinerja aparatur akan sangat berpengaruh pada baik atau buruknya kegiatan yang sedang dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 terdapat beberapa hal yang menunjukan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya:

1. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja.
2. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas.
3. Adanya keterbatasan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, baik penerapan akuntansi sektor publik dan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kendala yang ada harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar, kedepannya tercipta akuntabilitas kinerja yang baik. Penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sebelumnya menyimpulkan hasil yang berbeda, Pratiwi (2010), Pamungkas (2012) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik. Demikian juga menurut Wiboso (2016), Rezeqiah (2017), dan Wardani dan Silvia (2021) menunjukkan hasil bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tetapi, menurut Aprila dan Melfariza (2014) dan Prastianingrum (2018) Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari beberapa penelitian yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR.”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Penggunaan anggaran di lingkup instansi pemerintah Kota Bogor belum sepenuhnya menerapkan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan penerapan Performanced Based Organization. Padahal, apabila penggunaan anggaran sudah disusun sesuai dengan proses penganggaran yang berbasis kinerja pemerintah dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik. Selain itu adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikota Bogor.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat perumusan masalahnya sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor?
- 2) Bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor?
- 3) Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan akuntansi sektor publik secara bersama-sama (simultan) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkap studi empiris mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja dalam

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna memecahkan masalah.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.
- 2) Untuk menganalisis dan mengkaji besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.
- 3) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan akuntansi sektor publik secara bersama-sama (simultan) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada untuk berbagai pihak dan adapun kegunaan-kegunaan penelitian sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat membantu untuk memecahkan masalah yang ada pada, penerapan akuntansi sektor publik serta anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan mengantisipasi masalah yang ada terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya memperbaiki anggaran berbasis kinerja agar sasaran-sasaran yang dibuat dapat tercapai, serta meningkatkan upaya dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang diharapkan, sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang, tentang hal-hal yang terkait dengan kekurangan dan kelebihan penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik pada umumnya yang terkait khususnya dengan penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1. Definsi Akuntansi

Menurut Halim dan Kusufi (2017) akuntansi dapat didefinisikan dari sisi akuntansi sebagai sebuah seni, ilmu (*science*), maupun perekayasaan (*technology*). Menurut Majid (2019) akuntansi terdiri dari proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, teknik-teknik akuntansi meliputi tiga hal yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Pengakuan meliputi proses pengidentifikasian dengan memastikan bahwa suatu transaksi atau kejadian apakah merupakan kejadian ekonomi. Pengakuan juga meliputi pengidentifikasian apakah suatu transaksi kejadian ekonomi sudah bisa diakui atau belum berdasarkan kriteria tertentu yang berlandaskan pada asumsi basis akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, pengukuran yaitu apakah kejadian ekonomi tersebut dapat diukur dengan ukuran moneter atau nilai uang dan jika tidak maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Pengungkapan meliputi pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan, untuk memahami atau mengenal akuntansi sektor publik, maka sebaiknya melihat akuntansi dari sisi proses. Akuntansi dari sisi proses menurut *American Accounting Association* dalam Majid (2019) diartikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi sebagai sistem informasi yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan. Informasi yang tersedia nantinya dipakai oleh berbagai pihak intern maupun ekstern sebagai upaya pendukung dalam pengambilan keputusan.

2.1.2. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu jenis akuntansi. Menurut Majid (2019) akuntansi sektor publik meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Putra (2016) Akuntansi sektor publik merupakan entitas dari semua aktivitas yang berkaitan dengan domain publik untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Sektor publik memiliki fungsi untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta berbeda namun fungsinya tetap sama.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu rangkaian proses yang hampir sama dengan proses akuntansi tetapi entitas yang terdapat pada akuntansi sektor publik harus memiliki transparansi atau keterbukaan terhadap proses akuntansi tersebut kepada masyarakat.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Adapun tujuan Akuntansi Sektor Publik menurut *American Accounting Association* dalam Majid (2019) yaitu sebagai berikut.

1. *Accountability*

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggung jawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuannya ini adalah digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik.

2. *Management Control*

Tujuan dari adanya akuntansi sektor publik adalah dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam organisasi atau lembaga.

Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik

Jenis-jenis organisasi sektor publik dibagi menjadi tiga jenis menurut Biduri (2018) yaitu diantaranya:

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah seperti:

1) Pemerintah Pusat

Termasuk di dalamnya Kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain serta lembaga dan badan Negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan lain-lain.

2) Pemerintah Daerah

Termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. Seperti, rumah sakit milik pemerintah seperti rumah sakit daerah, yayasan-yayasan milik pemerintah, dan lain-lain.

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Seperti, Sampoerna *Foundation*, Dompet Dhuafa Republika, Sekolah dan Universitas Swasta, Rumah Sakit Milik Swasta, dan lain-lain.

Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Terdapat beberapa elemen elemen akuntansi sektor publik menurut pardede (2019) diantaranya:

1. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Maka, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada karena hakikat dan tujuan publik adalah kesejahteraan publik. Otomatis, tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis. Dapat diartikan bahwa perencanaan publik menjadi ilmu yang mempunyai karakter tersendiri.

2. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan

pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Tidak hanya itu, kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh kebijakan keuangan secara menyeluruh yang ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi, dukungan politis berbagai lembaga, dan akurasi perencanaan, terutama penganggaran yang dipengaruhi teknik reviu perkiraan anggaran.

3. Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran. Perlu diketahui, realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri atas kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Siklus tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Selanjutnya, perlu diketahui beberapa komponen laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas yang dilengkapi catatan atas laporan keuangan, ataupun laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan prospektus.

6. Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan. BUMN, instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan

organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini. Dikaji dari perspektif proses, audit berhubungan erat dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh berbagai organisasi sektor publik dan pemerintahan.

7. Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

Indikator Akuntansi Sektor Publik

Berikut ini merupakan indikator akuntansi sektor publik menurut Bastian (2014), yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya:

1. Transaksi
Persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.
2. Analisis bukti transaksi
Setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
3. Pencatatan data transaksi
Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.
4. Pengikhtisaran
Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.
5. Pelaporan
Selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.2. Anggaran Berbasis Kinerja

2.2.1. Definisi Anggaran

Menurut Putra (2016) anggaran adalah gambaran kondisi keuangan dari sebuah organisasi yang berisi informasi pendapatan, belanja dan aktivitas. Perencanaan anggaran merupakan cara mengalokasikan dana dengan baik dan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut nafarin dalam saipi (2018) anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam waktu tertentu. Anggaran tidak hanya digunakan sebagai alat perencana tetapi juga digunakan sebagai alat pengendalian untuk menilai kinerja organisasi atau keberhasilan suatu proyek. Pengendalian dilakukan guna menginformasikan kepada pihak manajemen bahwa anggaran yang di susun sudah diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga pengendalian dijalankan untuk mengontrol biaya biaya proyek yang dijalankan (umarella,2019).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan anggaran merupakan estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas atau organisasi dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak yang dinyatakan dalam ukuran moneter.

2.2.2. Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja menurut Bastian dalam Nanda (2016) sebagai teknik anggaran yang menjurus pada produk akhir suatu lembaga, dimana begitu kuat sekali ikatannya terhadap visi, misi dan rencana strategis kelembagaan tersebut. Majid (2019) mengatakan menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi, dan dikendalikan melalui *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain, didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program, penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bersasaran tanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Penulis menyimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atas aliran dana yang digunakan

sehingga masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui atau menilai kinerja dari pemerintah atas pengelolaan anggaran tersebut.

Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Terdapat beberapa karakteristik dalam anggaran berbasis kinerja, karakteristik menurut Melfariza dan Aprila (2014) diantaranya:

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai.
2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai.
3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja.
4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja.

Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Astria (2016) mengemukakan pentingnya anggaran berbasis kinerja bagi pemerintahan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Akuntabilitas organisasi publik kepada pemerintah dan publik lebih mudah dilihat
2. Lebih memotivasi peningkatan pelayanan kepada publik
3. Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah
4. Anggaran kinerja menekankan pada sasaran kinerja dan pencapaian bukan pada pembelian yang dilakukan oleh organisasi

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Melfariza dan Aprila (2014) tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*).
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*).
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikannya prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim dalam Nanda (2016) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja terdiri dari:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Disiplin anggaran.

3. Keadilan anggaran.
4. Efisiensi dan efektivitas anggaran.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mahmudi dalam Akbar (2018) mengemukakan tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut.

1. Penetapan strategi organisasi.
2. Pembuatan tujuan.
3. Penetapan aktivitas.
4. Penganggaran
5. Implementasi
6. Pelaporan kinerja
7. Evaluasi dan pengambilan keputusan.

Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bastian dalam Astria (2016) Penentuan indikator kinerja harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Indikator Masukan mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.
3. Indikator Keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar output. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu dan lokasi).

2.2.3. Definisi Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No; 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.2.4. Pengukuran Kinerja

Definisi Pengukuran Kinerja

Definisi Pengukuran kinerja menurut Larry D. Stout dalam Larashati (2016) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa periodik, jasa ataupun suatu proses. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menanggapi instruksi tersebut, Lembaga Administrasi Negara dan BPKP menyusun buku pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo dalam Astria (2016) secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja terdiri dari:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manager level menengah bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja menurut Rudianto dalam Darmawan (2016) :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Penilaian atau pengukuran kinerja berguna untuk :

- a) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan
- b) menyediakan sarana pembelajaran dan dapat memberi motivasi bagi pegawai. Bagaimana seharusnya mereka bertindak dan mengembangkan keterampilan atau pengetahuan kerja, guna mencapai hasil kerja terbaik
- c) memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Dengan adanya penilaian kinerja akan mendorong terbentuknya budaya berprestasi dalam organisasi. Bagaimana kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya
- d) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pengambilan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*; f) menciptakan akuntabilitas publik, Mahmudi dalam Achmad (2017).

Siklus Pengukuran Kinerja

Terdapat 5 tahap untuk melakukan Pengukuran kinerja yaitu perencanaan strategi, penciptaan indikator kinerja, mengembangkan sistem pengukuran data, penyempurnaan ukuran kinerja, dan mengintegrasikan dengan proses manajemen (Bastian dalam Astria 2016). Berikut uraian masing-masing 5 tahapan.

1. Perencanaan strategi
Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program operasional dan kegiatan/aktivitas.
2. Penciptaan indikator kinerja
Setelah perumusan strategi, instansi pemerintah perlu menyusun dan menetapkan ukuran atau kinerja dan beberapa jenis program, tahapan ini mungkin mudah dan sederhana untuk didefinisikan indikator kinerja dapat berupa indikator input, proses, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*. Indikator ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung.
3. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja
Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu:
 - Pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja.
 - Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan.
 - Ketiga, penggunaan data pengukuran yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat.

4. Penyempurnaan ukuran
Pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil (*outcomes*) dan indikator dampak (*impacts*) menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*).
5. Pengintegrasian dengan proses manajemen Pada saat ukuran kinerja tersedia, tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.

Indikator dalam Pengukuran Kinerja

Indikator pengukuran kinerja terdiri dari 3E yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Penjelasan 3E menurut Mahsun (2013), yaitu sebagai berikut.

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar masukan (*cost of input*). Pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

2. Efisiensi

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *ouput* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).

3. Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara Bersama-sama. Karena di satu pihak, mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika program dapat dilakukan dengan efisien dan efektif maka program tersebut dapat dikatakan *cost-effectiveness*.

2.3. Akuntabilitas Kinerja

2.3.1. Definisi Akuntabilitas Kinerja

Mahmudi dalam Asmawanti (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/ instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas kinerja itu sendiri menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan, menurut Ziman dan Muhammad dalam Asmawanti (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi. (Reyhan, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu entitas atau organisasi, apakah hasil kinerja yang telah dilakukan entitas atau organisasi tersebut berhasil sesuai dengan target atau mengalami kegagalan.

2.3.2. Macam-macam Akuntabilitas

Adapun penjelasan mengenai macam-macam akuntabilitas menurut Mahmudi (2015) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebayanya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

2.3.3. Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja

Menurut Herlina (2019) berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan LAKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip - prinsip sebagai berikut.

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3.4. Sistem Akuntabilitas Kinerja

Untuk menghasilkan LAKIP yang baik maka, perlu dilakukan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 yang terdiri dari:

1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Sedangkan, perjanjian kinerja menyusun lembar atau pernyataan

dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, program dan kegiatan serta anggaran. Indikator Kinerja diambil dari dokumen rencana strategis dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) spesifik (*specific*)
- 2) dapat terukur (*measurable*)
- 3) dapat dicapai (*attainable*)
- 4) berjangka waktu tertentu (*time bound*)
- 5) dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar atau pernyataan dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran Kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau pernyataan dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

4. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari laporan interim dan laporan kinerja tahunan.

5. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan Evaluasi Kinerja adalah reviu atas laporan kinerja untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dan evaluasi kinerja dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi yang berisi atas penilaian akuntabilitas kinerja satuan kerja. Adapun kategori penilaian hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Inteprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabilitas
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sstem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang, system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini juga mengambil sumber informasi atau data yang diteliti dari peneliti sebelumnya yang menyangkut penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2. 2
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	Kukuh Prastianingrum, (2018)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor Periode 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Anggaran - Akutabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Pelaksanaan Anggaran - Evaluasi Kinerja - Pencapaian Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Evaluasi Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 	Jurnal, Universitas Pakuan
2.	Seto Wiboso, (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Implementasi Anggaran - Pertanggungjawaban Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Implementasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 	Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

3.	Bambang Pamungkas, (2012)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Akuntansi Sektor Publik - Pengawasan - Laporan keuangan - Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi - Kebijakan - Prosedur - Penganggaran - Organisasi - Kebijakan - Prosedur - Penganggaran - Informasi Keuangan - Rencana Strategis - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan. 2. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. 	Jurnal Ilmiah Ranggagadin, Sekolah Tinggi Ilmu Kesatuan Bogor
----	---------------------------	--	--	---	---	---

4.	Ana Muchlisa Rezeqiah, (2017)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Berbasis Kinerja - Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Anggaran - Ratifikasi Anggaran - Implementasi Anggaran - Pelaporan dan Evaluasi Anggaran - Rencana Strategis - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja 	<p>Anggaran berbasis kinerja secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari α yang telah ditentukan.</p>	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang
5.	Herlina, (2019)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Pelaksanaan Anggaran - Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Visi - Misi - Tujuan - Sasaran - Kebijakan - Sistem akuntansi keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Makassar. 2. Berdasarkan uji regresi linear berganda, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran berpengaruh 	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar

			<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja - Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Unit kerja - Laporan kinerja - Rencana Strategi - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja 	<p>positif dan signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>	
6.	Nila Aprila dan Melfariza (2014)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (<i>Performance Based Budgeting</i>) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Berbasis Kinerja - Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Pelaksanaan Anggaran - Pelaporan Anggaran - Evaluasi Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. 2. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. 3. Pelaporan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas 	Jurnal, Universitas Bengkulu

					<p>kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu.</p> <p>4. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu.</p>	
7.	Sartika, (2019)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntansi Sektor Publik - Pengawasan Internal - Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis bukti transaksi - Pencatatan data transaksi - Pengikhtisaran - Pelaporan - Organisasi - Kebijakan - Prosedur - Penganggaran - Ekonomis - Efisiensi 	<p>Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Tidak terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.</p>	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang

				- Efektivitas		
8.	Shinta Pratiwi, (2010)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntansi Sektor Publik - Anggaran Berbasis Kinerja - Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis bukti transaksi - Pencatatan data transaksi - Pengikhtisaran - Pelaporan - Perencanaan Anggaran - Pelaksanaan Anggaran - Pelaporan Anggaran - Evaluasi Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. 2. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. 	Jurnal, Universitas Komputer Indonesia
9.	Nur Desiana Wardani dan Dewi Silvia, (2021)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran berbasis kinerja - Sasaran Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan - Perencanaan - Pelaksanaan - Pencapaian Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh positif dan 	Jurnal, Universitas Mitra Indonesia

		Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung	- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Evaluasi Kinerja	signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	
--	--	---------------------------------------	---	--------------------	--	--

Tabel 2. 3
Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel Independen	Dependen	
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	Pratiwi (2010), Pamungkas (2012), Sartika (2019),	-
Anggaran Berbasis Kinerja	Wiboso (2016), Rezeqiah (2017), Herlina (2019), Wardani dan Silvia (2021),	Aprila dan Melfariza (2014), Prastianingrum (2018)

(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021)

2.4.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari landasan teori dan peneliti terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka penelitian. Dalam kerangka penelitian ini terdapat variabel independen yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja serta variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut uraian mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini:

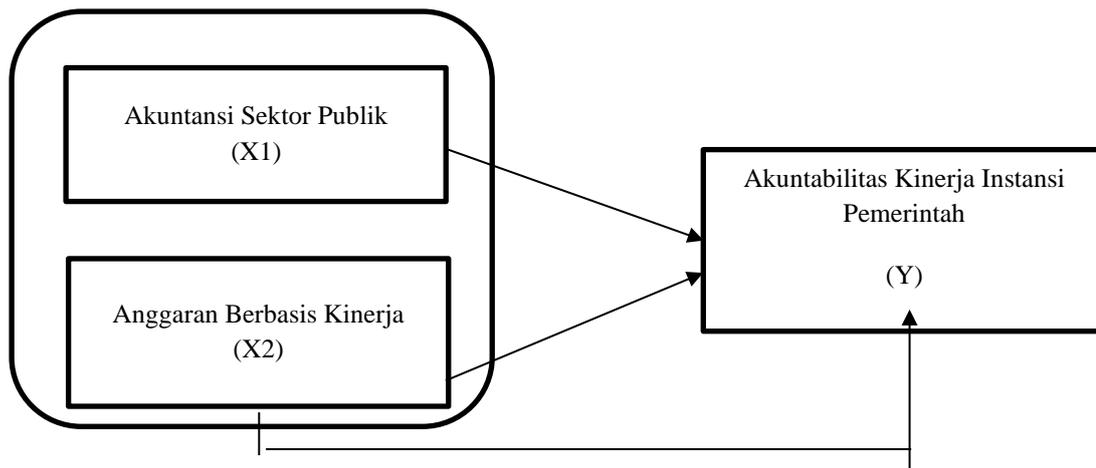
Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta peratnggungjawaban publik (Bastian, 2014).

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari Pratiwi (2010) bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diduga Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dibuat dalam bentuk skema berikut ini.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyajikan hipotesis yaitu:

- H1 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.
- H2 : Terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.
- H3 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Verifikatif dengan metode penelitian *Explanatory Survey*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antar dua variabel atau lebih dan merupakan hubungan sebab akibat.

Penelitian Verifikatif dengan metode penelitian *Explanatory Survey* menggunakan teknik penelitian statistik kualitatif yang dilakukan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan statistik kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Untuk lebih jelasnya akan dituangkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

Jenis/Bentuk Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Penelitian
Verifikatif	<i>Explanatory Survey</i>	Statistik Kualitatif dan Kuantitatif

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variable independen dan variabel dependen dengan variabel independen adalah penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan atau hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.2.2. Unit Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini unit analisis yang diteliti yaitu *Organization* atau Organisasi. Unit analisis berupa suatu organisasi, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (*respons*) suatu organisasi tertentu, dalam penelitian ini unit analisis penelitian yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kota Bogor.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kota Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif dan kuantitatif yang merupakan data primer karena data tersebut diperoleh melalui menyebarkan angket yang memuat kuesioner. Indikator-indikator variabel dijabarkan oleh penulis menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.

Sumber data penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang diperoleh langsung dari pegawai Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terdapat di Kota Bogor.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen/Variabel Tidak Terikat/Variabel Bebas

Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen dan sebagai variabel yang mendahului. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja.

2. Variabel dependen/variabel terikat/variabel tidak bebas

Variabel Dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain (variabel independen). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel

Varibel	Indikator	Ukuran	Skala
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	1. Analisis bukti transaksi	- Bukti transaksi dianalisis	Ordinal
	2. Pencatatan data transaksi	- Pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi	
	3. Pengikhtisaran	- Memposting ke dalam buku besar	
	4. Pelaporan	- Menyusun laporan keuangan untuk	

		dianalisis kebenarannya reliabilitasnya duji dan	
		Sumber : Salamah (2020)	
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dimengerti	- Kontribusi dalam penyusunan anggaran - Keterlibatan dalam penyusunan anggaran - Alasan melakukan revisi anggaran - Usulan kepada atasan - Penyelesaian akhir dan meminta pendapat atasan	Ordinal
		Sumber : Sulkarnaim S (2016)	
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas	- Cermat dalam penggunaan dan alokasi sumberdaya - Penggunaan sumber daya - Pencapaian dan tujuan sasaran	Ordinal
		Sumber : Salamah (2020)	

3.5. Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Populasi Penelitian adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kota Bogor yang berjumlah 36. Teknik *non probability sampling* yang dipilih adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini diantaranya adalah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, berkompeten dalam administrasi keuangan, serta mampu

menyusun akuntansi sektor publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor pada 5 SKPD Dinas. Jelasnya sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3

No.	Organisasi
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data primer yang diperoleh langsung dari pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kota Bogor dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan menggunakan Skala *Likert* dengan pemberian skor sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|---------------|
| 1. SS | : Sangat Setuju | Diberi skor 5 |
| 2. S | : Setuju | Diberi skor 4 |
| 3. N | : Netral | Diberi skor 3 |
| 4. TS | : Tidak Setuju | Diberi skor 2 |
| 5. STS | : Sangat Tidak Setuju | Diberi skor 1 |

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS Versi 24). Maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.7.1. Uji Kualitas Data

Agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka instrumen tersebut dapat diujikan dalam bentuk uji validitas dan uji realibitas.

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Produk Moment Pearson. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016) uji reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dalam penelitian ini dalam menguji reliabilitas masing-masing instrumen penulis menggunakan uji staistik *Cronbach Alpha* (α). Perhitungan reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* (α) ini dilakukan dengan bantuan komputer IBM SPSS 24.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linear berganda dalam penggunaannya harus memenuhi uji asumsi klasik yang ditetapkan. Dalam uji asumsi klasik terdapat 4 analisis, diantaranya adalah:

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Menggunakan bantuan aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 24, hasil analisis akan memberikan gambaran dalam bentuk tabel. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dengan IBM SPSS 24 dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai Tolerancen dan VIF (*variance inflation factor*). Nilai Cuttof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) Uji heteroskedestisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Plot.

3.7.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui dan memprediksi apakah variabel (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan seberapa besar pengaruhnya kedua variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) pada penelitian ini.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (nilai Y apabila X1 dan X2 = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = Variabel independent

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Semakin tinggi R^2 , semakin penting suatu variabel karena dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, maka digunakan koefisien determinasi untuk mengukur besar sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi terkoreksi atau model regresi, maka model didapatkan akan semakin baik.

3.7.4 . Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan uji yang berupa langkah pembuktian dugaan peneliti atau hipotesis. Langkah ini untuk menguji kebenaran hipotesis yang dikemukakan peneliti secara linear.

Uji t

Menurut Ghozali (2016) Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial pada analisis data penelitian ini menggunakan derajat signifikansi yaitu 0,05. Uji t dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 24 yang disajikan pada tabel Coefficient.

1. jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima.
2. is diterima.
3. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Sedangkan penolakan atau penerimaan hipotesis dengan membandingkan antara t-hitung dan t-tabel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. jika $t\text{-tabel} = t\text{-hitung} = t\text{-tabel}$ maka hipotesis diterima.
 - b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka hipotesis ditolak.

Uji F

Menurut Ghazali (2016) Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji pengaruh simultan (Uji F) dikenal dengan uji serentak atau Uji Model atau uji anova. Uji statistik F pada analisis data penelitian ini menggunakan standar kepercayaan 0,05.

1. jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka berarti bahwa secara simultan variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $\leq 0,05$ maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara simultan variabel independen merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Bogor

Secara umum, cikal bakal Kota Bogor adalah Pakuan Pajajaran yang merupakan ibu kota kerajaan Hindu di Jawa Barat. Namun sebagai kota modern, Bogor baru lahir seiring dengan pembangunan Vila “*Buitenzorg*” pada tahun 1745 atas prakarsa Gubernur Jenderal Gustaf Wiliam Baron van Imhof yang memerintah antara tahun 1743-1750.

Pada tahun 1744, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van Imhoff membangun istana Bogor seiring dengan pembangunan jalan raya Daendels yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang. Pada waktu itu, Bogor direncanakan sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal.

Setahun kemudian, Gubernur Jenderal van Imhoff menggabungkan *Sembilan* distrik yang terdiri dari Pondok Gede, Cijeruk, Sindang Barang, Ciawi, Ciomas, Balubur Limbangan, Dramaga, dan Kampung Baru ke dalam satu pemerintahan yang disebut *Regentschap Kampung Baru Buitenzorg*.

Pada periode 1745-1808, Bogor (*Buitenzorg*) menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Para gubernur jenderal tidak lagi menempati istana di Jakarta. Mereka memilih menjalankan roda pemerintahan kolonial di era tersebut di *Buitenzorg* kendati tidak secara resmi.

Menurut catatan, paling tidak ada *sembilan* Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelum Daendels, sudah bertempat tinggal di Istana Bogor ini. Kendati peresmian sebenarnya baru berlangsung pada tahun 1866 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 11 Tahun 1866.

Pada masa pendudukan Inggris (1811-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles berjasa mengembangkan Kota Bogor. Pada masa itu, Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*). Raffles juga mempekerjakan seorang perancang kota (*planner*) yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan.

Setelah pemeritahan kembali pada Hindia Belanda pada tahun 1903, terbit undang-undang *desentralisasi* yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Sebagai realisasinya dibentuk *Stadsgemeente* (pemerintah kota).

Sejak tahun itu, Bogor (*Buitenzorg*) secara administrative resmi lepas dari Batavia dan diberikan otonomi sendiri berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal

Hindia Belanda No. 208 Tahun 1905. Sejak saat itu pula, secara resmi berdiri sebuah pemerintahan otonom, yakni sebuah *stadsgemeente*.

Adanya surat penetapan tersebut menjadikan Bogor menjadi salah satu pemerintahan kota yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari kota Bandung yang baru ditetapkan sebagai *Standgemeente* setahun kemudian (1906). *Gemeente Buitenzorg* dengan seorang *Burgemeenter* (wali kota) kala itu, yakni Mr. Bagchus (1920-1927); dan corak pemerintahan ini berlangsung sampai dengan masa pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, kependudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor. Pada masa ini, nama-nama lembaga pemerintahan berubah namanya, yaitu keresidenan menjadi *syoeoe*, kabupaten menjadi *ken*, kota menjadi *si*, kewedanaan menjadi *gun*, kecamatan menjadi *soe* dan desa menjadi *koe*.

Pada masa setelah kemerdekaan RI (17 Agustus 1945) dan disusul periode *revolusi*, kota-kota otonom di seluruh Indonesia termasuk Bogor umumnya diduduki Belanda. Pada tahun itu pula, terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pemerintah yang erat kaitannya dengan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU 16/1950, *Gemeente Buitenzorg* berganti nama menjadi Pemerintah Kota Besar Bogor. Selanjutnya pada tahun 1957, nama Pemerintah Kota Besar berubah menjadi Kota Praja Bogor sesuai dengan UU 1/1957.

Kemudian UU 18/1965 dan UU/1974 menetapkan penggantian nama pemerintah Kota Praja Menjadi Pemerintah Kota Bogor sampai dengan sekarang.

4.1.2 Gambaran Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut dengan kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70 %, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

Luas wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Dari Sektor Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

No.	Nama Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
1.	Sekretariat Daerah Kota Bogor
2.	Sekretariat DPRD Kota Bogor
3.	Inspektorat Daerah Kota Bogor
4.	Lembaga Badan terdiri dari 6 Lembaga: <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kota Bogor 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor
5.	Lembaga Dinas terdiri dari 19 Dinas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Kota Bogor 2. Dinas Kesehatan Kota Bogor 3. Dinas Sosial Kota Bogor 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor 5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor 6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor 13. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor 14. Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 17. Dinas Perhubungan Kota Bogor

	18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor 19. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor
6.	RSUD Kota Bogor
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
8.	Kecamatan terdiri dari 6 kecamatan, diantaranya : 1. Kecamatan Bogor Utara 2. Kecamatan Bogor Selatan 3. Kecamatan Bogor Timur 4. Kecamatan Bogor Barat 5. Kecamatan Bogor Tengah 6. Kecamatan Tanah Sereal
9.	Lembaga Bagian terdiri dari 9 Lembaga Bagian, di antaranya: 1. Bagian Administrasi Pembangunan 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat 3. Bagian Perekonomian 4. Bagian Hukum dan HAM 5. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6. Bagian Organisasi 7. Bagian Pemerintahan 8. Bagian Umum 9. Bagian Pengadaan Barang

4.1.3 Visi dan Misi Kota Bogor

Visi adalah gambaran masa depan yang hendak dituju, sehingga berfungsi sebagai pengarah perjalanan sedangkan misi adalah jalan pilihan untuk menuju masa depan, sehingga berfungsi sebagai pemfokus dan pemberi makna terhadap kerja. Untuk itu, dapatlah dikatakan bahwa urgensi keterukuran visi dan misi maka akan mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi yang diperintahkan dalam suatu program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun Visi Kota Bogor adalah Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Ramah Keluarga. Sedangkan Misi nya yaitu:

1. Mewujudkan kota yang sehat
2. Mewujudkan kota yang cerdas
3. Mewujudkan kota yang sejahtera

Dengan menyusun visi dan misi, pembangunan daerah diharapkan dapat menyentuh pada kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan melakukan penjangkaran aspirasi dari bawah ke atas (*bottom up*), mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat serta menemukan solusi yang tepat guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Pembangunan daerah harus dapat melibatkan segala macam elemen masyarakat, swasta dan pemerintah dengan mengelaborasi dan memadukan rencana pembangunan daerah selama periode tertentu, contoh: dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra (Rencana Strategi), Renja (Rencana Kerja), atau dokumen sejenisnya. Dokumen

perencanaan inilah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya selama 5 tahun.

Oleh karena itu kepala daerah harus membuat konsep visi dan misi pembangunan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan RPJPD sehingga bisa lebih realistis dan menyentuh pada kebutuhan rakyat di daerah. Manfaat penyusunan program kerja para kandidat yang disesuaikan dengan PRJPD maupun RPJMD akan berdampak pada pembangunan daerah lebih terarah, tertata dan terencana dengan matang.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 29 November 2021. Dari 50 kuesioner yang disebar terdapat 48 kuesioner yang diterima kembali, berjumlah 2 yang tidak kembali.

Tabel 4.2
Rincian Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Nama Instansi	Jumlah Kuesioner yang Dibagikan	Jumlah Kuesioner yang Dikembalikan	Jumlah Kuesioner yang Diolah	Jumlah Kuesioner yang Tidak Kembali
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	8	8	2
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu	10	10	10	0
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	10	10	0
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	10	0
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	10	10	10	0

Sumber: Data Primer , diolah (2021)

Tabel 4.3
Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang Disebar	50	100%
Kuesioner yang Tidak Kembali	2	4%
Kuesioner yang Tidak Memenuhi Syarat	-	0%
Kusioner yang Dapat Diolah	48	96%

Sumber: Data Primer , diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 50 buah, tetapi hanya 48 kuesioner yang dapat dijadikan sebagai data penelitian bagi peneliti. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 96%, hal ini dikarenakan 2 kuesioner tidak kembali sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data penelitian. Tingkat kuesioner yang tidak kembali sebesar 4%.

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pegawai pemerintah daerah Kota Bogor maka dapat diketahui karakteristik responden dibawah ini:

a. Jenis Kelamin Responden

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Deskripsi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	23	48 %
2.	Wanita	25	52 %
Jumlah		48	100%

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin yang menjadi responden dalam penelitian lebih unggul wanita dibandingkan pria yaitu wanita sebanyak 25 responden dengan tingkat presentase (52%), dan pria terdapat 23 responden dengan tingkat presentase sebesar (48%) dari jumlah keseluruhan responden.

b. Jabatan Responden

Pengelompokkan responden berdasarkan usia dibagi menjadi enam kelompok dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Deskripsi Jabatan Responden

No.	Jabatan	Jumlah	Presentase
1.	Kepala Badan/Dinas/Instansi	-	0
2.	Sekretaris	1	2%
3.	Bendahara	2	4%
4.	Kabid/Kabag	2	4%
5.	Kasubid/Kasubag//Kasie	14	30%
6.	Staf	29	60%
Jumlah		48	100%

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki jabatan sebagai staff dengan jumlah responden sebesar 29 orang atau dengan tingkat presentase sebesar (60)%, kemudian jabatan selanjutnya yaitu kasubid /kasubag/kasi sebanyak 14 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (30)%, responden dengan jabatan kabid terdapat 2 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (4)%, responden dengan jabatan bendahara 2 orang responden dengan tingkat presentase (4%), dan yang terakhir jabatan sekretaris terdapat 1 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (2)% dari jumlah keseluruhan responden.

c. **Tingkat Pendidikan Responden**

Aspek pendidikan sangat penting bagi pegawai pemerintah, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pada sisi yang lain, tingkat pendidikan pada masa sekarang ini menjadi salah satu persyaratan utama untuk dapat menduduki jabatan apapun untuk dipromosikan pada jabatan lebih tinggi. Adapun pengelompokan tingkat pendidikan dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SLTA/Sederajat	4 orang	8%
2.	Diploma	3 orang	6%
3.	Sarjana	23 orang	48%
4.	Pasca Sarjana	18 orang	38%
Jumlah		48	100%

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan Pasca Sarjana yaitu sebanyak 18 responden dengan tingkat presentase sebesar (38)%, pendidikan Sarjana sebanyak 23 responden dengan tingkat presentase sebesar (48)%, pendidikan Diploma sebanyak 3 responden dengan tingkat presentase sebesar (6)%, dan pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 4 responden dengan tingkat presentase sebesar (8)%.

d. Lama Bekerja

Karakteristik pegawai yang menjadi responden berdasarkan lama bekerja ditunjukkan dibawah ini:

Tabel 4.7
Deskripsi Lama Bekerja Responden

No.	Frekuensi	Jumlah	Presentase
1.	1-5 Tahun	6 orang	13%
2.	6-10 Tahun	2 orang	4%
3.	11-15 Tahun	12 orang	25%
4.	16-20 Tahun	10 orang	21%
5.	> 21 Tahun	18 orang	37%
Jumlah		48 Orang	100 %

Sumber : Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini sebagian besar responden telah bekerja lebih dari 21 tahun sebanyak 18 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (37)%, kemudian lama bekerja 11-15 tahun sebanyak 12 reponden dengan tingkat prsentase sebesar (25)% , lama bekerja 16-20 tahun terdapat 10 responden dengan tingkat presentase sebesar (21)%, lama bekerja 1-5 tahun sebanyak 6 responden dengan tingkat presentase (13%) dan yang terakhir lama bekerja 6-10 tahun terdapat 2 reponden dengan tingkat presentase sebesar (4)% dari jumlah keseluruhan responden.

e. Latar Belakang Pendidikan

Karakteristik latar belakang pendidikan yang menjadi responden ditunjukkan dibawah ini:

Tabel 4.8
Deskripsi Latar Belakang Pendidikan Responden

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Ekonomi	24 orang	50%
2.	Hukum	5 orang	10%
3.	Teknik	2 orang	4%

4.	Sosial	6 orang	13%
5.	Lainnya	11 orang	23%
Jumlah		48 orang	100%

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini sebagian besar berlatar belakang pendidikan ekonomi sebanyak 24 orang responden dengan tingkat presentase (50)%, kemudian berlatar belakang pendidikan lainnya sebesar 11 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (23) %, latar belakang pendidikan sosial 6 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (13)%, latar belakang pendidikan hukum 5 orang responden dengan tingkat presentase (10)%, dan yang terakhir berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 2 orang responden dengan tingkat presentase (4)% dari jumlah keseluruhan responden.

4.2.2. Deskripsi Data Variabel

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Anggaran Berbasis Kinerja (X2), dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) peneliti menggunakan 5 *skala likert*, yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Anggaran Berbasis Kinerja (X2), dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang terdapat dalam kuesioner, yaitu :

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Tabel 4.9
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

No. Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	0	0	0	0	3	6.25	23	47.9	22	45.8	48	100
2	0	0	1	2.1	5	10.4	31	64.6	11	22.9	48	100
3	0	0	0	0	3	6.25	23	47.9	22	45.8	48	100
4	2	4.2	4	8.3	1	2.1	28	58.3	13	27.1	48	100
5	0	0	1	2.1	5	10.4	31	64.6	11	22.9	48	100
6	1	2.1	0	0	0	0	34	70.8	13	27.1	48	100
7	4	8.3	2	4.2	6	12.5	32	66.7	6	12.5	48	100

Jumlah dan Presentase	7	1	8	1.1	23	3.3	202	28.8	98	14	48	100
-----------------------	---	---	---	-----	----	-----	-----	------	----	----	----	-----

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa untuk item pertanyaan-pertanyaannya paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pertanyaan *pertama* 47.9% menjawab setuju bahwa transaksi yang terjadi relevan dan dapat diandalkan, pertanyaan *kedua* 64.6% menjawab setuju bahwa transaksi telah dicatat sesuai dengan standar (penilaian), pertanyaan *ketiga* menjawab setuju dengan presentase 47.9% bahwa transaksi telah dilaporkan sesuai dengan standar pelaporan (tepat waktu pelaporan), pertanyaan *keempat* 58.3% menjawab setuju laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas, pertanyaan *kelima* menjawab setuju dengan presentase 64.6% bahwa laporan keuangan memiliki kendala informasi, pertanyaan *keenam* 70.8% menjawab setuju bahwa laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pertanyaan *ketujuh* 66.7% menjawab setuju bahwa laporan keuangan menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari keseluruhan pernyataan pada variabel akuntansi sektor publik, sebagian besar responden menjawab setuju dengan presentase sebesar 28.8%. Sehingga indikator siklus akuntansi sektor publik antara lain: analisis bukti transaksi, pencatatan data transaksi, pengikhtisaran dan pelaporan sudah mewakili pernyataan-pernyataan dari indikator tersebut.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Tabel 4.10
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)

No. Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	9	18,75	3	6,25	12	25	14	29,17	10	20,83	48	100
2	3	6,25	2	4,17	24	50	14	29,17	5	10,412	48	100
3	3	6,25	2	4,17	20	41,67	17	35,42	6	12,5	48	100
4	9	18,75	2	4,17	17	35,42	13	27,08	7	14,58	48	100
5	6	12,5	3	6,25	10	20,83	25	52,08	4	8,33	48	100
6	4	8,33	3	6,25	15	31,25	18	37,5	8	16,67	48	100
7	6	12,5	0	0	20	41,67	16	33,33	6	12,5	48	100
8	13	27,08	2	4,17	15	31,25	11	22,92	7	14,58	48	100
9	12	25	3	6,25	9	18,75	17	35,42	7	14,58	48	100
10	8	16,67	1	2,08	5	10,42	33	68,75	1	2,08	48	100

Jumlah dan Presentase	73	7.3	21	2.1	147	14.7	178	17.8	61	6.1	48	100
-----------------------	----	-----	----	-----	-----	------	-----	------	----	-----	----	-----

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel 4.10 pernyataan mengenai anggaran berbasis kinerja, pada pernyataan *pertama* responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 29,17% bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja agar mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatannya. Kemudian pernyataan *kedua* sebagian besar responden menanggapi setuju dengan presentase sebesar 29,17% bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dari Rencana Strategik/Renstra, Rencana Kinerja/Renja, serta mengembangkan standar analisis kinerja, standar pelayanan minimal, dan standar harga pada satuan kinerja. Pernyataan nomor *tiga* sebagian besar responden menjawab netral dengan presentase 41,67% bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja menjadi panduan perencanaan kinerja yang mengaitkan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Pernyataan *keempat* sebagian besar responden menjawab 35,42% netral bahwa seluruh komponen organisasi dalam satuan kerja membuat suatu komitmen untuk mengembangkan penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerjanya. Pernyataan nomor *lima* 52,08% menjawab setuju bahwa anggaran berbasis kinerja mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya pernyataan nomor *enam* 37,5% menjawab setuju mengenai pengembangan penganggaran berbasis kinerja dimaksud yaitu menyempurnakan klasifikasi belanja, indikator kinerja lainnya dan standar biaya yang spesifik secara berkala, agar kinerja penganggaran berbasis kinerja semakin baik. Pernyataan nomor *tujuh* 41,67% menjawab netral bahwa berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Pernyataan nomor *delapan* 31,25% menjawab netral bahwa pengembangan penganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh komponen organisasi dalam memahami penganggaran berbasis kinerja. Lalu pernyataan nomor *sembilan* setuju dengan presentase sebesar 35,42% bahwa anggaran berbasis kinerja meningkatkan pelayanan. Selanjutnya pernyataan nomor *sepuluh* sebagian besar responden menjawab setuju dengan presentase 68,75% bahwa anggaran berbasis kinerja mengidentifikasikan kegiatan yang mengandung kelemahan dan memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam. Dari keseluruhan pernyataan pada variabel anggaran berbasis kinerja, sebagian besar responden menjawab setuju dengan presentase sebesar 17.8% Sehingga indikator anggaran berbasis kinerja antara lain: relevan, andal dan dapat dimengerti sudah mewakili pernyataan-pernyataan dari indikator tersebut.

3. Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 4.11
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No. Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	9	18.75	4	8.33	13	27.08	14	29.17	8	16.67	48	100
2	2	4.17	0	0	20	41.67	15	31.25	11	22.92	48	100
3	6	12.5	2	4.17	18	37.5	15	31.25	7	14.58	48	100
4	10	20.83	2	4.17	9	18.75	17	35.42	10	20.83	48	100
5	9	18.75	20	41.67	3	6.25	16	33.33	0	0	48	100
6	9	18.75	16	33.33	2	4.17	19	39.58	2	4.17	48	100
7	9	18.75	3	6.25	20	41.67	14	29.17	2	4.17	48	100
8	6	12.5	2	4.17	13	27.08	21	43.75	6	12.5	48	100
9	9	18.75	3	6.25	17	35.42	9	18.75	10	20.83	48	100
10	6	12.5	18	37.5	4	8.33	18	37.5	2	4.17	48	100
11	3	6.25	1	2.08	13	27.08	28	58.33	3	6.25	48	100
Jumlah dan presentase	78	7.1	71	6.5	132	12	186	17	61	5.5	48	100

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa pernyataan *pertama* sebagian besar responden menjawab setuju dengan presentase sebesar 29,17% bahwa visi dan misi program ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi, pernyataan *kedua* 41,67% responden menjawab netral bahwa kinerja instansi pemerintah harus membuat perencanaan strategis (renstra), pernyataan *ketiga* 37,5% responden menjawab netral untuk mengembangkan berbagai indikator kinerja dalam instansi pemerintah, pernyataan *keempat* 35,42% responden menjawab setuju bahwa pimpinan harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil, selanjutnya pernyataan *kelima* 41,67% responden menjawab tidak setuju bahwa pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (accountable) hasil, lalu pernyataan *keenam* 39,58% responden menjawab setuju mengenai pimpinan dan staf selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil, pernyataan *ketujuh* 41,67% responden menjawab netral bahwa pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya, pernyataan *kedelapan* 43,75% responden menjawab setuju bahwa pegawai menerima pengakuan positif dalam pencapaian tujuan staregis organisasi, pernyataan *kesembilan* 35,42% responden menjawab netral bahwa kinerja instansi pemerintah dapat menghubungkan antara pencapaian kinerja dengan tujuan startegis organisasi, lalu pernyataan nomor *sepuluh* sebagian besar menjawab setuju dan tidak setuju bahwa kurangnya intensif dalam kinerja instansi pemerintah tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi dengan jumlah presentase yang sama yaitu 37,5%, dan pernyataan terakhir 58,33% menjawab setuju bahwa laporan akuntabilitas digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan. Dari keseluruhan pernyataan pada variabel kinerja

instansi pemerintah, sebagian besar responden menjawab setuju dengan presentase sebesar 17% Sehingga indikator *value for money* kinerja instansi pemerintah antara lain: ekonomi, efisiensi dan efektivitas sudah mewakili pernyataan-pernyataan dari indikator tersebut.

4.3 Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS Versi 24). Maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

No.	Instrumen Penelitian	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (r hitung)	r Tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.519	0.279	Valid
2	Pernyataan 2	0.714	0.279	Valid
3	Pernyataan 3	0.519	0.279	Valid
4	Pernyataan 4	0.335	0.279	Valid
5	Pernyataan 5	0.714	0.279	Valid
6	Pernyataan 6	0.313	0.279	Valid
7	Pernyataan 7	0.498	0.279	Valid

Sumber: *Output SPSS 24 Data Primer*, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen didalam variabel penerapan akuntansi sektor publik yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X2)

No.	Instrumen Penelitian	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (r hitung)	r Tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.301	0.279	Valid

2	Pernyataan 2	0.289	0.279	Valid
3	Pernyataan 3	0.320	0.279	Valid
4	Pernyataan 4	0.314	0.279	Valid
5	Pernyataan 5	0.431	0.279	Valid
6	Pernyataan 6	0.460	0.279	Valid
7	Pernyataan 7	0.430	0.279	Valid
8	Pernyataan 8	0.640	0.279	Valid
9	Pernyataan 9	0.354	0.279	Valid
10	Pertanyaan 10	0.401	0.279	Valid

Sumber: *Output SPSS 24 Data Primer*, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen didalam variabel anggaran berbasis kinerja yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No.	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	R Tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.640	0.279	Valid
2	Pernyataan 2	0.482	0.279	Valid
3	Pernyataan 3	0.495	0.279	Valid
4	Pernyataan 4	0.334	0.279	Valid
5	Pernyataan 5	0.308	0.279	Valid
6	Pernyataan 6	0.290	0.279	Valid
7	Pernyataan 7	0.621	0.279	Valid
8	Pernyataan 8	0.350	0.279	Valid
9	Pernyataan 9	0.535	0.279	Valid
10	Pernyataan 10	0.346	0.279	Valid
11	Pernyataan 11	0.285	0.279	Valid

Sumber: *Output SPSS 24 Data Primer*, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument didalam variabel Kinerja Instansi Pemerintah yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.15
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	Keterangan
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	0.686	0.60	Reliabel
Anggaran Berbasis Kinerja (X2)	0.648	0.60	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.648	0.60	Reliabel

Sumber : *Output SPSS 24 Data Primer, diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.16
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Test

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		48
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	4.18686460
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.072
	<i>Positive</i>	.060
	<i>Negative</i>	-.072
<i>Test Statistic</i>		.072
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

This is a lower bound of the true significance.d

Sumber : *Output SPSS 24 Data Primer, diolah (2021)*

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) yang diperoleh yaitu 0.200 melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolineritas

Tabel 4.17

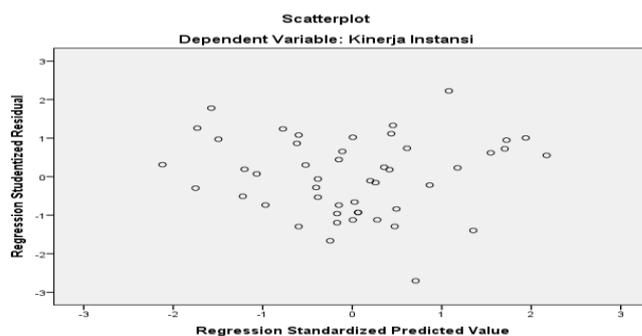
Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.529	7.013		1.501	.140		
	X1	-.072	.268	-.034	-.270	.789	.790	1.266
	X2	.801	.147	.680	5.431	.000	.790	1.266

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, hasil perhitungan nilai *tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 dengan nilai *tolerance* masing-masing variabel independen sebesar 0.790. sementara itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen sebesar 1.266. sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* dan VIF tidak ada multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Heterokedasitas



Gambar 4.1 Diagram Scatterplot

Sumber : *Output SPSS 24 Data Primer*, diolah (2021)

Berdasarkan gambar 4.1 hasil diagram scatterplot diatas, data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heterokedasitas.

4.3.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.529	7.013		1.501	.140
	X1total	-.072	.268	-.034	-.270	.789
	X2total	.801	.147	.680	5.431	.000
a. Dependent Variable: Ytotal						

Sumber : *Output SPSS 24 Data Primer, diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 4.18 diatas bila dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* kolom B, persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 10,529 + -0,072 X1 + 0,801 X2 + e$$

Dalam persamaan regresi diatas konstanta adalah sebesar 10,529 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) dan anggaran berbasis kinerja (X2) yang mempengaruhi, maka kinerja instansi pemerintah yang terjadi pada Pemerintah Kota Bogor sebesar 10,529. sedangkan hasil uji regresi linear berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien penerapan akuntansi sektor publik (X1) sebesar -0,072 tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan penerapan akuntansi sektor publik satu satuan maka variabel kinerja instansi pemerintah turun sebesar -0,072 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
2. Nilai koefisien anggaran berbasis kinerja (X2) sebesar 0,801 berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja satu satuan maka variabel kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,801 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.443	.418	4.279

a. *Predictors: (Constant), Anggaran Kinerja, ASP*

b. *Dependent Variable: Kinerja Instansi*

Sumber : *Output SPSS 24 Data Primer, diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.443 atau 44,3% hal ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah yang ada pada Pemerintah Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja sebesar 44,3% dan sisanya 55.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Parsial (uji t)

Tabel 4.20
Hasil Pengujian Parsial (uji t)

Coefficients-

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.529	7.013		1.501	.140
	X1total	-.072	.268	-.034	-.270	.789
	X2total	.801	.147	.680	5.431	.000

a. *Dependent Variable: Ytotal*

Sumber : *Output SPSS 24 Data Primer. Diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 4.20 diatas hasil uji t :

1. Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai t-hitung sebesar -0,270 dengan taraf signifikan sebesar 0,789 yang lebih besar dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H1 ditolak**, yang dapat dinyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.
2. Variabel anggaran berbasis kinerja memiliki nilai t-hitung sebesar 5,431 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja secara signifikan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 diterima**, yang

dapat dinyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor

Pengujian Hipotesis Parsial (uji F)

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Simultan (uji F)

ANOVA-						
Model		<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	654.410	2	327.205	17.871	.000 ^b
	<i>Residual</i>	823.902	45	18.309		
	<i>Total</i>	1478.313	47			

a. *Dependent Variable:* Kinerja Instansi

b. *Predictors:* (*Constant*), Anggaran Kinerja, ASP

Sumber : *Output SPSS 24 Data Primer, diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 4.21 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 17.871 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Sehingga jika penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja secara bersama-sama meningkat maka kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah, maka dapat dilakukan pembahasan atau analisis antara kesesuaian teori dengan praktek yaitu sebagai berikut :

Instansi pemerintah adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melakukan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada orang banyak. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila mampu mengolah, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi potensi sumber daya manusia pada dasarnya merupakan salah satu modal dan memegang peran yang paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai dijadikan dasar pedoman bagi yang berkepentingan dalam melaksanakan

kedisiplinan untuk mewujudkan pegawai yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggaraan pemerintah yang merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik *Good Governance*, maka pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai ini antara lain membuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijadikan kepada pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk membina pegawai agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atas aliran dana yang digunakan sehingga masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui atau menilai kinerja dari pemerintah atas pengelolaan anggaran tersebut.

4.4.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan antara Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel X1 sebesar -0,072 artinya variabel X1 tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Hasil pengujian hipotesis nilai t-hitung untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai t-hitung sebesar -0,270 dengan taraf signifikan sebesar 0.789 yang lebih besar dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa **H1 ditolak**, yang dapat dinyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.

4.4.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan antara Anggaran Berbasis Kinerja (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel X2 sebesar 0,801 artinya variabel X2 berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Hasil pengujian hipotesis nilai t-hitung sebesar 5,431 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja secara signifikan mempengaruhi kinerja

instansi pemerintah Kota Bogor. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.

4.4.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Secara Bersama-sama Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan hasil pengujian simultan yang telah dilakukan antara Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) dan Anggaran Berbasis Kinerja (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil perhitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 17.871 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H3 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. Dengan menggunakan dua variabel independen yaitu Penerapan akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja, serta variabel dependen yaitu Kinerja Instansi Pemerintah. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas dibab sebelumnya peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh dan tidak *signifikan* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor dikarenakan penerapan akuntansi sektor publik belum mampu menunjang akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Akuntabilitas dari masing-masing SKPD masih rendah sehingga mempengaruhi kinerjanya. SKPD Kota Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik
2. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh *positif* dan *signifikan* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor dikarenakan anggaran berbasis kinerja membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dan mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan anggaran berbasis kinerja karena dengan anggaran berbasis kinerja yang baik dan optimal akan berdampak baik pada kinerja instansi pemerintah.
3. Penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja secara *simultan* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor. Adanya penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik agar terciptanya *good governance*.

5.2 Saran

Beberapa saran yang perlu dikemukakan adalah :

1. Saran bagi Pemerintah Kota Bogor
 - a. Untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik
Agar ditahun mendatang bisa ditingkatkan pengelolaann keuanganya baik secara ekonomis , efisien maupun efektifitasnya sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor lebih baik dalam penerapan akuntansi sektor publiknya.
 - b. Untuk variabel anggaran berbasis kinerja
Perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dimasa mendatang dapat terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
 - c. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja instansi pemerintah yang baik, pemerintah dapat memaksimalkan pencapaian kinerja dengan tetap mengusahakan pencapaian kinerja 100% sesuai dengan visi dan misi Kota Bogor.
 - d. Pemerintah dapat mempertimbangkan latar belakang pendidikan dari setiap pegawai untuk lebih disesuaikan lagi dengan masing-masing tugasnya agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya
 - a. Yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, disarankan untuk menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.
 - b. Wilayah penelitian bisa lebih diperluas dalam menentukan objek penelitian, misalnya penelitian dalam satu kantor dinas, badan, atau organisasi lain dibawah instansi pemerintah agar lebih spesifik hasil dari penelitiannya.
 - c. Lebih selektif lagi dalam menentukan responden dari setiap SKPD sehingga instrumen yang dibagikan atau disebarakan dapat diisi dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. (2016). *Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan*. Jurnal. STIA Indagiri.
- Asmawati. (2020). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang)*. Jurnal. Universitas Negeri Makassar.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar: Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Firdaus. (2016). *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Trijaya Pratama Futures Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, A. dan Kusufi, S. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Kusufi M, S. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlina. (2019). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kota Bogor. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019*. Tersedia di: <https://kotabogor.go.id> [Diakses 27 Februari 2021]
- Larashati. (2016). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala sekolah, Kompetensi Guru dan Kompensasi Terhadap Kinerja Guru*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaid.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama: BPFE. Yogyakarta.
- Nila Aprila dan Melfariza. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*. Jurnal. Universitas Bengkulu.

- Pamungkas, B. (2012). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal. ilmiah Ranggagading, Vol. 12, No. 2.
- Putra. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal. Universitas Udayana.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Prastianingum, K. (2018). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor Periode 2014-2017*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Reyhan, M,F. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Propinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Rezeqiah, A, M. (2017). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Salamah. (2020). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor)*. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor.
- Sartika. (2019). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sinta Pratiwi. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal. Universitas Komputer Indonesia.
- Sulkarnaim S (2016). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Kualitas sumber Daya Manusia dan Reward terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wardani, N, S. dan Silvia, D. (2021). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, [online] Volume 6(1), pp. 47-56. Tersedia di: ... [Diakses pada 12 Maret 2021].

Wibisono, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, [online] Volume 5(9), pp. 2460-0585. Tersedia di: [Diakses pada 12 Maret 2021].

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Resti Rezeki
Alamat : Kp. Babakan Kencana, Rt03/Rw06, Desa
Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi,
Jawa Barat
Tempat dan Tanggal Lahir : Sekabumi, 02 Maret 1997
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Babakan Kencana
• SMP : SMPN 1 Cicurug
• SMA : SMAN 1 Cigombong
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Desember 2021

Peneliti,

(Tri Resti Rezeki)

LAMPIRAN
Kuesioner Penelitian

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor”, dengan ini saya bermaksud untuk memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sebagai responden dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Akhir kata saya mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam mengisi kuesioner ini. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk lingkungan hidup kita.

Peneliti,

Tri Resti Rezeki

DATA RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki-Laki PerempuanUsia saat ini : 20-30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun \geq 51 TahunPendidikan Terakhir : SMU/SMA/SMK Diploma Sarjana PascaSarjana

Latar Belakang

Pendidikan : Ekonomi Hukum Teknik Sosial Lainnya

Nama Dinas/Badan :

Jabatan :

Bidang :

Masa Kerja : 1-5 Tahun 6-10 Tahun 11-15 Tahun 16-20 Tahun \geq 21 Tahun

Keterangan cara pengisian :

Berikut ini adalah pernyataan mengenai “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor”

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda centang (√) diantara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|---------------|
| 1. STS | : Sangat Tidak Setuju | Diberi skor 1 |
| 2. TS | : Tidak Setuju | Diberi skor 2 |
| 3. N | : Netral | Diberi skor 3 |
| 4. S | : Setuju | Diberi skor 4 |
| 5. SS | : Sangat Setuju | Diberi skor 5 |

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Transaksi yang terjadi relevan dan dapat diandalkan.					
2	Transaksi telah dicatat sesuai dengan standar (penilaian).					
3	Transaksi telah dilaporkan sesuai dengan standar pelaporan (tepat waktu pelaporan).					
4	Laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas.					
5	Laporan keuangan memiliki kendala informasi.					
6	Laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
7	Laporan keuangan menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.					

2. Anggaran Berbasis Kinerja (X2)

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda centang (√) diantara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1
2. TS : Tidak Setuju Diberi skor 2
3. N : Netral Diberi skor 3
4. S : Setuju Diberi skor 4
5. SS : Sangat Setuju Diberi skor 5

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penyusunan anggaran berbasis kinerja agar mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatannya.					
2	Penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dari Rencana Strategik/ Renstra, Rencana Kinerja/ Renja, serta mengembangkan standar analisis belanja, standar pelayanan minimal, dan standar harga pada satuan kinerja.					
3	Penyusunan anggaran berbasis kinerja menjadi perpaduan perencanaan kinerja yang mengaitkan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.					
4	Seluruh komponen organisasi dalam satuan kerja membuat suatu komitmen untuk mengembangkan penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerjanya.					
5	Anggaran Berbasis Kinerja mencegah penyalahgunaan wewenang.					
6	Pengembangan penganggaran berbasis kinerja dimaksud yaitu menyempurnakan klasifikasi belanja, indikator kinerja lainnya dan standar biaya yang spesifik secara berkala, agar kinerja penganggaran berbasis kinerja semakin baik.					
7	Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.					
8	Pengembangan penganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh komponen organisasi dalam memahami penganggaran berbasis kinerja.					
9	Anggaran Berbasis Kinerja meningkatkan pelayanan.					
10	Anggaran Berbasis Kinerja mengidentifikasi kegiatan yang mengandung kelemahan dan memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam.					

3. Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda centang (√) diantara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1
2. TS : Tidak Setuju Diberi skor 2
3. N : Netral Diberi skor 3
4. S : Setuju Diberi skor 4
5. SS : Sangat Setuju Diberi skor 5

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Visi dan misi program ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
2	Membuat perencanaan strategis (renstra).					
3	Mengembangkan berbagai indikator kinerja.					
4	Pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil.					
5.	Pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (accountable) hasil.					
6	Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama- sama dalam mengevaluasi hasil.					
7	Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya.					
8	Pegawai menerima pengakuan positif dalam pencapaian tujuan strategis organisasi.					
9	Menghubungkan antara pencapaian kinerja dengan tujuan strategis organisasi.					
10	Kurangnya intensif tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi.					
11	Laporan akuntabilitas digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan.					

Uji Validitas

Uji Validitas X1									
No. Responden	No. Soal							Total $\sum Y$	$\sum Y^2$
	1	2	3	4	5	6	7		
1	4	5	4	4	5	5	4	31	961
2	5	4	5	4	4	5	4	31	961
3	5	4	5	4	4	5	4	31	961
4	5	4	5	4	4	4	4	30	900
5	5	3	5	5	3	4	3	28	784
6	4	4	4	4	4	4	4	28	784
7	5	5	5	4	5	4	4	32	1024
8	5	5	5	4	5	4	4	32	1024
9	4	4	4	4	4	4	3	27	729
10	4	5	4	5	5	4	1	28	784
11	4	5	4	4	5	4	4	30	900
12	5	4	5	2	4	5	4	29	841
13	4	3	4	4	3	4	4	26	676
14	4	4	4	5	4	4	4	29	841
15	4	4	4	4	4	5	4	29	841
16	4	4	4	5	4	4	1	26	676
17	4	4	4	5	4	4	4	29	841
18	5	4	5	2	4	5	4	29	841
19	5	4	5	4	4	4	1	27	729
20	5	5	5	2	5	4	4	30	900
21	4	4	4	4	4	5	3	28	784
22	4	4	4	4	4	4	4	28	784
23	4	4	4	4	4	4	4	28	784
24	3	4	3	5	4	4	5	28	784
25	5	4	5	5	4	4	1	28	784
26	5	4	5	4	4	4	4	30	900
27	5	4	5	5	4	4	4	31	961
28	3	4	3	4	4	4	3	25	625
29	3	4	3	5	4	4	3	26	676

UJI VALIDITAS X2												
No. Responden	No. Soal										Total ΣY	ΣY^2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	5	3	3	3	3	1	1	1	5	1	26	676
2	2	3	3	5	3	5	4	4	4	4	37	1369
3	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	35	1225
4	5	5	4	3	5	4	4	5	4	4	43	1849
5	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	33	1089
6	3	3	3	4	3	4	5	5	4	5	39	1521
7	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4	35	1225
8	5	3	5	1	3	2	3	3	5	4	34	1156
9	1	3	3	1	3	4	3	3	2	4	27	729
10	4	3	3	1	3	5	5	4	3	4	35	1225
11	4	4	5	1	4	3	3	3	3	3	33	1089
12	3	3	5	1	3	3	3	3	4	4	32	1024
13	1	4	1	1	4	3	4	3	3	4	28	784
14	3	4	3	2	4	5	3	5	1	4	34	1156
15	3	4	3	4	4	1	3	3	1	4	30	900
16	5	5	5	5	4	4	3	3	1	3	38	1444
17	2	1	3	4	4	4	4	5	1	4	32	1024
18	3	4	3	1	4	3	3	5	1	4	31	961
19	5	5	3	1	4	1	4	1	1	4	29	841
20	2	1	1	1	2	3	4	3	2	4	23	529
21	3	3	4	3	2	3	4	3	4	4	33	1089
22	1	3	1	3	4	5	5	5	5	4	36	1296
23	3	3	3	5	4	2	1	3	4	4	32	1024
24	3	3	4	3	4	3	4	3	1	4	32	1024
25	3	3	2	3	5	5	5	3	1	4	34	1156
26	3	5	4	5	4	2	1	1	1	4	30	900
27	4	4	2	3	4	3	3	4	3	3	33	1089
28	5	3	4	3	3	1	3	1	3	4	30	900
29	4	2	3	3	2	3	3	3	5	4	32	1024
30	4	4	3	5	1	3	3	4	3	4	34	1156

UJI VALIDITAS Y													
No. Resoinden	No. Soal											Total $\sum Y$	$\sum Y^2$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5	3	3	3	4	4	3	4	2	1	1	33	1089
2	2	3	3	5	4	4	3	4	4	4	1	37	1369
3	4	3	3	2	4	4	3	5	5	4	4	41	1681
4	5	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	45	2025
5	3	3	3	3	1	5	1	5	3	2	2	31	961
6	3	3	3	4	4	1	4	4	3	2	3	34	1156
7	3	4	3	3	4	1	4	4	5	2	4	37	1369
8	5	3	5	1	4	4	3	4	1	1	4	35	1225
9	1	3	3	1	2	4	1	4	4	4	4	31	961
10	4	3	3	1	2	2	3	3	4	4	4	33	1089
11	4	4	5	1	2	3	3	1	3	2	4	32	1024
12	3	3	5	1	1	4	4	1	1	2	4	29	841
13	1	4	1	1	4	2	3	4	3	2	3	28	784
14	3	4	3	2	4	4	3	4	3	2	3	35	1225
15	3	4	3	4	2	2	4	2	5	4	4	37	1369
16	5	5	5	5	2	2	4	3	2	3	4	40	1600
17	2	1	3	4	2	2	3	4	3	2	4	30	900
18	3	4	3	1	2	2	3	4	5	2	4	33	1089
19	5	5	3	1	4	4	4	4	2	1	4	37	1369
20	2	1	1	1	3	4	2	5	3	2	4	28	784
21	3	3	4	3	2	2	4	4	1	1	4	31	961
22	1	3	1	3	2	1	3	4	3	2	3	26	676
23	3	3	3	5	1	1	3	3	3	3	3	31	961
24	3	3	4	3	2	2	4	5	3	2	5	36	1296
25	3	3	2	3	1	2	3	4	3	4	3	31	961
26	3	5	4	5	2	2	3	3	4	2	3	36	1296
27	4	3	4	4	3	2	4	4	5	2	4	39	1521
28	4	4	4	4	2	2	3	3	4	1	3	34	1156
29	4	5	1	4	4	4	3	3	4	1	4	37	1369
30	4	3	5	4	2	2	3	3	5	2	4	37	1369

Penyusunan Instrumen

Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Sumber : Salamah (2020)

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Transaksi yang terjadi relevan dan dapat diandalkan.					
2	Transaksi telah dicatat sesuai dengan standar (penilaian).					
3	Transaksi telah dilaporkan sesuai dengan standar pelaporan (tepat waktu pelaporan).					
4	Laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas.					
5	Laporan keuangan memiliki kendala informasi.					
6	Laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
7	Laporan keuangan menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.					

Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber : Sulkarnaim S (2016)

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penyusunan anggaran berbasis kinerja agar mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatannya.					
2	Penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dari Rencana Strategik/ Renstra, Rencana Kinerja/ Renja, serta mengembangkan standar analisis belanja, standar pelayanan minimal, dan standar harga pada satuan kinerja.					
3	Penyusunan anggaran berbasis kinerja menjadi perpaduan perencanaan kinerja yang mengaitkan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.					
4	Seluruh komponen organisasi dalam satuan kerja membuat suatu komitmen untuk mengembangkan penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerjanya.					
5	Pengembangan penganggaran berbasis kinerja dimaksud yaitu menyempurnakan klasifikasi belanja, indikator kinerja lainnya dan standar biaya yang spesifik secara berkala, agar kinerja penganggaran berbasis kinerja semakin baik.					
6	Pengembangan penganggaran berbasis kinerja dimaksud yaitu menyempurnakan klasifikasi belanja, indikator kinerja lainnya dan standar biaya yang spesifik secara					

	berkala, agar kinerja penganggaran berbasis kinerja semakin baik.					
7	Pengembangan penganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh komponen organisasi dalam memahami penganggaran berbasis kinerja.					

Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Salamah (2020)

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Visi dan misi program ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
2	Membuat perencanaan strategis (renstra).					
3	Mengembangkan berbagai indikator kinerja.					
4	Pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil.					
5.	Pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (accountable) hasil.					
6	Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama- sama dalam mengevaluasi hasil.					
7	Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya.					
8	Pegawai menerima pengakuan positif dalam pencapaian tujuan strategis organisasi.					
9	Menghubungkan antara pencapaian kinerja dengan tujuan strategis organisasi.					
10	Kurangnya intensif tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi.					
11	Laporan akuntabilitas digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan.					